

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya setiap kegiatan manusia tidak bisa terlepas dari manusia yang lainnya. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia selalu memiliki hubungan dengan manusia lain, sehingga setiap Tindakan yang dilakukan oleh satu manusia dapat berdampak kepada manusia lainnya. Termasuk kegiatan berekonomi dalam rangka mencukupi kehidupan sehari-hari dengan mencari pendapatan ekonomi.

Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan termasuk didalamnya kegiatan berdagang, kegiatan hukum dan yang lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut didukung dengan sumber-sumber yang meningkatkan kinerja kegiatan tersebut, sumber-sumber tersebut salah satunya adalah sumber daya listrik, karena listrik merupakan sumber daya yang sangat penting bagi masyarakat, karena sebagian besar kegiatan manusia didukung oleh listrik mulai dari perdagangan, jasa, produksi dan yang lainnya.

Tenaga listrik mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu. Dengan demikian listrik merupakan kebutuhan bagi orang banyak dan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

menyatakan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”. berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk kebutuhan sehari-hari khususnya di bidang listrik. pemerintah Republik Indonesia dan khususnya Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan melakukan pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik, serta pelaksanaannya dilimpahkan dan dipercayakan kepada PT. PLN (Persero)

Syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN harus terjadi perjanjian antara pelanggan listrik dengan perusahaan. Dengan adanya perjanjian, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara, dimana kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pengertian Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedang perjanjian itu sendiri mengandung pengertian yaitu:¹

“Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain menunaikan prestasi.”

¹ Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, Hal.6.

Hubungan antara PT. PLN dan pelanggan adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak. Dalam KUH Perdata Pasal 1313 dikatakan bahwa ,suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²

Kewajiban dari PT. PLN adalah mengalirkan aliran listrik dengan segala prasarannya kepada pelanggan, sedangkan pelanggan listrik pascabayar berkewajiban untuk membayar tagihan listrik yang dipakai tiap bulannya sesuai dengan besarnya pemakaian aliran listrik yang di tunjukkan oleh meteran listrik, bagi pelanggan listrik prabayar agar listrik dapat terus tersalurkan maka pelanggan haru membeli token listrik atau pulsa listrik yang besarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehar-hari.

Mengenai pemakaian tenaga listrik ini pelanggan berhak menentukan besaran daya pemakaian tenaga listrik untuk keperluan rumah tangganya. Misalnya 450watt, 900watt, 1300watt dan 2200watt sesuai dengan yang di inginkan oleh pelanggan tersebut. Jika dalam berlangsungnya pemakaian daya tenaga listrik yang di alirkan terasa kurang maka pelanggan dapat menghubungi PT. PLN untuk menambah daya listrik. pelanggan dapat datang langsung ke kantor PLN terdekat, setelah adanya permintaan penambahan daya listrik dari pelanggan maka pihak PLN menerbitkan surat tugas untuk melakukan penambahan daya yang diberikan kepada petugas berdasarkan surat tugas tersebut petugas langsung datang kerumah pelanggan dan mengganti alat yang

² HR Daeng Naja, 2006, *Contrant Drafting*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 6.

disebut MCB (miniature circuit breaker) yaitu suatu alat yang berfungsi untuk memutus aliran listrik apabila terdapat kelebihan pemakaian daya listrik. jika MCB tidak sesuai dengan daya yang dipakai maka secara otomatis akan memutus aliran listrik.

Namun masih ada pelanggan yang melakukan tambah daya secara illegal, pelanggan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemakaian arus listrik. Pelanggaran pemakaian arus listrik pihak pelanggan tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak PT. PLN. Untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut, maka pihak PT. PLN dapat mengupayakan suatu hal bagi penyelesaian pelanggaran pemakaian arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan. Bila salah satu dari pelanggan arus listrik pada PT. PLN pada saat mengajukan permohonan penyambungan atau pemasangan daya arus listrik memohon daya sebesar 900 Kwh. Atas dasar permohonan tersebut maka pihak PT. PLN akan mengabulkan permohonan tersebut, sekaligus menyambungkan daya sebesar 900 Kwh kepada pihak pelanggan yang mengajukan permohonan daya tersebut.

Bila terbukti pelanggan menggunakan daya listrik tidak sebagaimana yang disepakati sesuai kontrak yang diadakan yaitu daya yang kedapatan ternyata lebih besar dari daya yang terpasang semula, maka pelanggar telah melakukan perbuatannya yang melanggar ketentuan kontrak perjanjian. Atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggan, pihak PT. PLN memberitahukan hal pelanggaran tersebut kepada pihak pelanggan yang menggunakan daya arus listrik melebihi kapasitas yang tersedia tanpa seizin PT. PLN. Pemberitahuan tersebut disampaikan dengan Surat panggilan yang intinya memerintahkan

pelanggan untuk menghadap pimpinan PT. PLN. Pihak pelanggan yang melanggar ketentuan PT. PLN diwajibkan untuk membayar tagihan susulan tersebut dengan jenis pelanggaran yang telah diberitahukan kepadanya.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan Judul **“TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENAMBAHAN DAYA LISTRIK ANTARA PT. PLN DENGAN KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana proses perjanjian penambahan daya listrik antara PT. PLN dengan Konsumen?
2. Bagaimana peraturan hak dan kewajiban dalam Perjanjian PT. PLN dengan Konsumen?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian jual beli listrik antara PT. PLN dengan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses perjanjian penambahan daya listrik antara PT. PLN Persero dengan Konsumen
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam perjanjian penambahan daya listrik.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian penambahan daya listrik antara PT. PLN Persero dengan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna menambah pemahaman dan wawasan secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan dapat memberikan informasi terhadap penulis, serta dapat menambah pengetahuan dan bekal penulis mengenai ilmu hukum dan penerapannya di masyarakat dalam melakukan perjanjian kerjasama.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga masyarakat umum untuk memberikan wawasan dan pemahaman mengenai proses pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam bidang usaha.

3. Manfaat Bagi Ilmu Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran serta memberikan referensi bagi pengembangan dibidang ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah aspek hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian penambahan daya listrik.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif, karena bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu gejala, kejadian, atau fakta yang terjadi secara langsung dan hubungannya dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang tanggung jawab hukum dan pelaksanaan perjanjian ditinjau dari perspektif hukum Perdata.

3. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yang digunakan agar memperoleh data Sekunder yang didapatkan melalui bahan:

1) Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang dapat menunjang untuk melengkapi data-data yang diperlukan peneliti untuk menyusun skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu dengan penelitian langsung dilapangan yang didapatkan melalui:

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor PT. PLN Surakarta.

b. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan subyek adalah Staff atau Pegawai PT. PLN yang mampu menjelaskan tanggung jawab hukum terhadap penambahan daya listrik.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data untuk mendeskripsikan sesuatu masalah hukum, dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi, perlu pendekatan masalah dan jenis studi yang akan dilakukan, apakah hanya dilakukan di perpustakaan

atau juga akan ke lapangan.³ Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Metode Studi Kepustakaan.

Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, membaca, mempelajari peraturan perundang-undangan dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Metode Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna untuk mendapatkan data primer penelitian tersebut :

1) Menyusun Pertanyaan

Menyusun pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu Staff atau pegawai PT. PLN (kantor Surakarta)

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya kepada pihak yang terkait yaitu staff atau pegawai PT. PLN (kantor Surakarta)

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan

³ Hilman Hadikusumo, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 75.

rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian⁴. Dalam hal ini penulis menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait dengan perjanjian penambahan daya listrik antara PT. PLN Persero dengan Konsumen.

F. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian PT. PLN Persero
- B. Pengertian Konsumen
- C. Pengertian Perjanjian Penambahan Daya Listrik
- D. Pihak - pihak yang melakukan Perjanjian Penambahan Daya Listrik
- E. Perjanjian antara PT. PLN dengan Konsumen atas Penambahan Daya Listrik
- F. Hubungan Hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian Penambahan daya listrik
- G. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian penambahan daya listrik
- H. Peraturan dalam perjanjian antara PT. PLN dengan Konsumen

⁴ *Loc. Cit.*

- I. Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Hukum antara PT. PLN dengan Konsumen
- J. Overmacht
- K. Resiko
- L. Ganti Rugi
- M. Berakhirnya Perjanjian Sewa – Menyewa

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses perjanjian penambahan daya listrik antara PT. PLN dengan Konsumen
- B. Peraturan Hak dan kewajiban dalam Perjanjian PT. PLN dengan Konsumen
- C. Tanggung jawab Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Listrik

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA